KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kinerja buruk,anggaran pendidikan rawan penyimpangan,DPR selidiki kasus proyek laboratorium di 16 PTN
Tanggal : Selasa, 04 September 2012
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 15

Kinerja Buruk, Anggaran Pendidikan Rawan Penyimpangan

DPR Selidiki Kasus Proyek Laboratorium Di 16 PTN

Selain mendapat status *disclaimer* alias rapor merah terkait laporan keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh juga harus bertanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laboratorium di 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

KASUS ini terungkap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya indikasi kuat kongkalikong anggaran pendidikan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan perusahaan Muhammad Nazaruddin.

16 kampus tersebut, yakni Universitas Sumatera Utara sebesar Rp 30 miliar, Universitas Negeri Malang Rp 40 miliar, Universitas Brawijaya Rp 30 miliar, Universitas Udayana Rp 30 miliar, Universitas Negeri Jambi Rp 30 miliar, Universitas Negeri Jakarta Rp 45 miliar, ITS Surabaya Robotika Rp 40 miliar dan Forensik Rp 30 miliar, Universitas Sudirman Rp 30 miliar, Universitas Sriwijaya Rp 30 miliar.

Lalu Universitas Tadulako Rp 30 miliar, Universitas Cendana Rp 20 miliar, Universitas Patimura Rp 35 miliar, Universitas Papua Rp 30 miliar, Universitas 11 Maret Rp 40 miliar, Universitas Tirtayasa Rp 50 miliar, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rp 40 miliar.

Menurut Anggota Komisi X DPR bidang Pendidikan Dedi Gumelar, kasus ini harus cepat dituntaskan. Apalagi indikasi korupsinya sangat besar dan anggaran pendidikan sangat rawan akan penyimpangan.

"Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR telah menerima hasil audit BPK terkait dugaan korupsi tersebut dan sedang dipelajari sejauh mana keterlibatan petinggi Diknas, para rektor PTN dan pihak lain dalam kasus tersebut," tegas Dedi kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dikatakan, kasus ini tak lepas dari tanggung jawab dan wewenang Kemendikbud yang dinilai gagal menciptakan kualitas pendidikan nasional yang bebas korupsi. Menteri Nuh disarankan untuk segera membenahi sistem keuangan di kementeriannya yang dianggap buruk.

"Gebrakan Nuh lamban dalam memperbaiki sistem pendidikan. Hal itu terlihat dari masih banyaknya temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Alhasil, laporan keuangan Kemendikbud selalu *disclaimer*," kata Miing, sapaan Dedi Gumelar.

Miing menyatakan, Kemendikbud harus introspeksi diri atas status *disclaimer* yang diberikan BPK."Itu akibat tata kelola keuangan yang tidak beres. Buktinya terjadi penyimpangan di 16 universitas itu," cetusnya.

Dikatakan Miing, DPR akan menyelidiki lebih dalam kasus ini dan akan memanggil Mendikbud pekan depan untuk meminta penjelasaan atas laporan BPK tersebut.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, laporan BPK sudah diterima dan pihaknya masih mempelajari laporan tersebut.

"Berdasarkan audit BPK, jelas menunjukkan adanya persekongkolan bahkan kongkaling anggaran pengadaan laboratorium di 16 PTN. Modusnya, bukan memberikan anggaran berdasarkan kebutuhan, tapi langsung menelepon ke rektor. Ditanya butuh uang atau tidak, setelah itu proyek baru dibuat," tuding Eva.

Tindak Oknum Rektor

Direktur Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Maulana mengatakan, Mendikbud Nuh bertanggung jawab atas kasus ini dan mesti menindak para oknum rektor yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Harus ada restrukturisasi kepengurusan organisasi di tingkat universitas untuk mencegah kasus ini terulang kembali. Anggaran pendidikan harus benar-benar dialokasi untuk kemajuan pendidikan," tegasnya.

Mendikbud Muhammad Nuh menyatakan, pihaknya tetap berada pada jalur yang telah diatur Undang-Undang (UU), termasuk dalam penggunaan dana di Kementeriannya. Pihaknya tetap bersikukuh bahwa keuangan di kementeriannya tidak ada masalah.

"Pada prinsipnya kami siap untuk diperiksa KPK dan bertanggung jawab jika ada yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Jadi biarkan aparat hukum bekerja," tegas Nuh. ■ DWI/CR-3